



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## MITIGASI BENCANA ERUPSI GUNUNG SEMERU

**Dewi Restu Mangeswuri**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Erupsi Gunung Semeru memasuki hari ketiga, sejak Minggu 4 Desember 2022. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Semeru kembali erupsi pada Selasa 6 Desember 2022 pada pukul 05.02 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 400 meter di atas puncak ( $\pm 4076$  m di atas permukaan laut). Gunung Semeru secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, berada pada posisi  $8^{\circ} 6,5'$  LS dan  $112^{\circ} 55'$  BT dengan tinggi puncaknya 3676 mdpl. Gunung Semeru dipantau secara visual dan instrumental dari 2 Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) yang berada di Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, serta di Desa Agrosuko, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.

Sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik setelah terjadi Awan Panas Guguran (APG) dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru dari level III (siaga) menjadi level IV (awas). Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci 11 titik pengungsian itu meliputi; 266 jiwa di SDN 4 Supiturang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-oro Ombo, 119 jiwa di SDN 2 Sumberurip, 228 jiwa di Balai Desa Sumberurip, 131 jiwa di Balai Desa Penanggal, 52 jiwa di Pos Gunung Sawur, 216 jiwa di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro dan sisanya di SMPN 2 Pronojiwo.

Sementara itu, wilayah yang terdampak APG Gunung Semeru meliputi Desa Capiturang dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumpersari di Kecamatan Rowokangkung, Desa Penanggal dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro dan Desa Pasirian di Desa Pasirian. Hingga tulisan ini diterbitkan, belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Basarnas, TNI, Polri, relawan dan lintas instansi terkait terus melakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG yaitu sebagai berikut:

1. Mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui PVMBG.
2. Tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 17 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 19 km.
3. Tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
4. Mewaspada potensi APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat dan Kali Lanang serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

5. Agar masyarakat tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak bertanggungjawab mengenai aktivitas Gunung Semeru, dan mengikuti arahan dari instansi yang berwenang yakni Badan Geologi yang akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan K/L, Pemda, dan instansi terkait lainnya.

Untuk mencegah dampak lanjutan erupsi bagi pengungsi, BNPB dan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat penampungan, dan sanitasi. Tanggap darurat merupakan tahapan awal sesaat setelah terjadi bencana serta masih perlu diteruskan ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah kondisi lebih stabil, tahap berikutnya adalah perumusan mitigasi bencana. Peran penting mitigasi terletak pada besarnya dampak bencana yang dapat ditekan dan minimnya kerugian finansial akibat bencana.

## Atensi DPR

Bencana yang terjadi menimbulkan berbagai persoalan kompleks. Pemangku kebijakan dan masyarakat perlu memerhatikan mitigasi bencana. Sistem peringatan dini bencana harus berjalan dan dikembangkan menjadi peringatan dini berbasis komunitas/masyarakat sebagai salah satu bentuk mitigasi. Setiap komunitas di wilayah bencana perlu dibekali pengetahuan mendeteksi potensi bencana yang terintegrasi dengan sistem peringatan bencana utama. Pembuatan peta kawasan rawan bencana perlu dilakukan secara partisipatif bersama komunitas. Komisi V DPR RI bersama dengan pemangku kebijakan harus mulai membuat studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan potensi bencana kawasan untuk melihat persoalan tata ruang. Hal ini penting untuk revitalisasi wilayah yang menjadi penyokong kawasan sehingga ke depan, perbaikan kawasan mampu mereduksi dampak erupsi. Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong pemerintah secara bertahap melakukan relokasi pemukiman penduduk dengan radius yang cukup aman dari erupsi dan aliran lahar sebagai upaya mitigasi lainnya walaupun hal ini membutuhkan anggaran yang besar dan ketersediaan lahan untuk relokasi.

## Sumber

republika.co.id, 6 Desember 2022;  
kompas.id, 6 Desember 2022; dan  
vsi.esdm.go.id, 4 Desember 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Monika Suhayati  
Venti Eka Satya

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022